

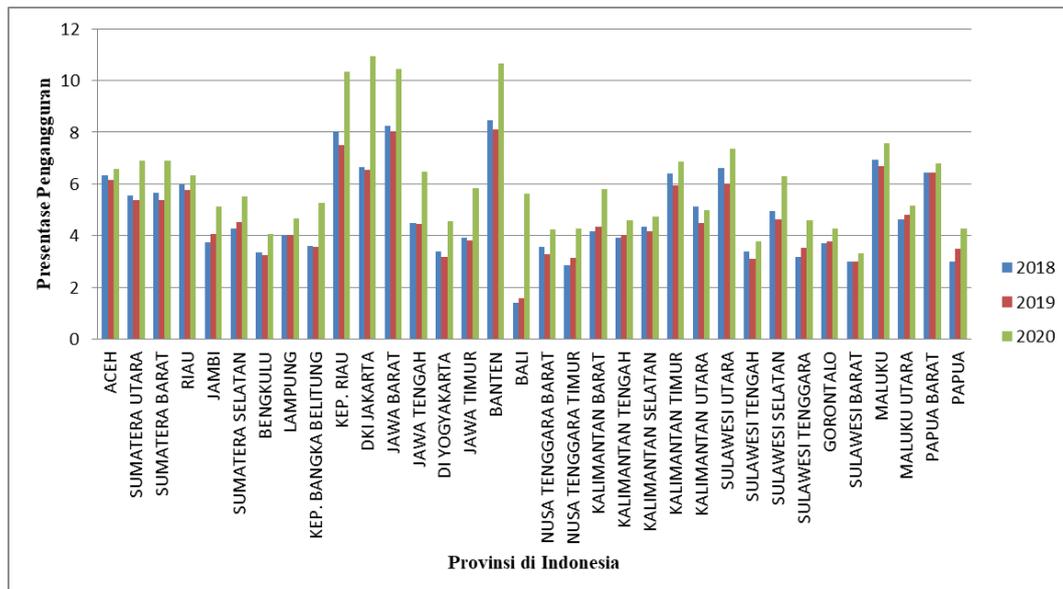
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk sebagai negara berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang, tentunya masih dalam tahap untuk membangun perekonomian yang lebih maju. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam tahap pembangunan ekonomi selalu ada masalah perekonomian, seperti permasalahan makro ekonomi yang tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satu masalah pokok ekonomi yang dihadapi negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pengangguran. Menurut Mankiw (2003) pengangguran merupakan masalah dari ketenagakerjaan yang tidak seimbang. Ketenagakerjaan termasuk dalam faktor penting pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam pasar tenaga kerja, terbentuk dari dua hal yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja atau *demand for labor* dan *supply for labor*. Permintaan tenaga kerja diadakan oleh pihak perusahaan yang meminta tenaga kerja (produsen), sedangkan penawaran tenaga kerja oleh pihak tenaga kerja, di dalam pasar tenaga kerja terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang terjadi akibat penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja, menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja sehingga terjadinya pengangguran. Penelitian ini membahas dari sisi penawaran tenaga kerja (*supply for labor*), penyebab pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka termasuk indikator untuk mengukur jumlah penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh permintaan atau pasar tenaga kerja. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini sering terjadi di Indonesia yang termasuk negara berkembang, setiap tahunnya jumlah penduduk terus meningkat lebih cepat dari pada jumlah lapangan pekerjaan. Berikut data tingkat pengangguran di Indonesia pada tiga tahun terakhir:



Gambar 1.1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Periode Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,30% dan pada tahun 2019 menjadi 5,23%, dan terjadi peningkatan selama masa pandemi Covid 19 menjadi 7,07%. Meskipun cenderung menurun setiap tahunnya sebelum terjadi pandemi. Masalah pengangguran tetap saja menjadi salah satu masalah ekonomi terbesar yang harus

ditangani untuk kemajuan perekonomian Indonesia, maka dari itu perlunya solusi dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran.

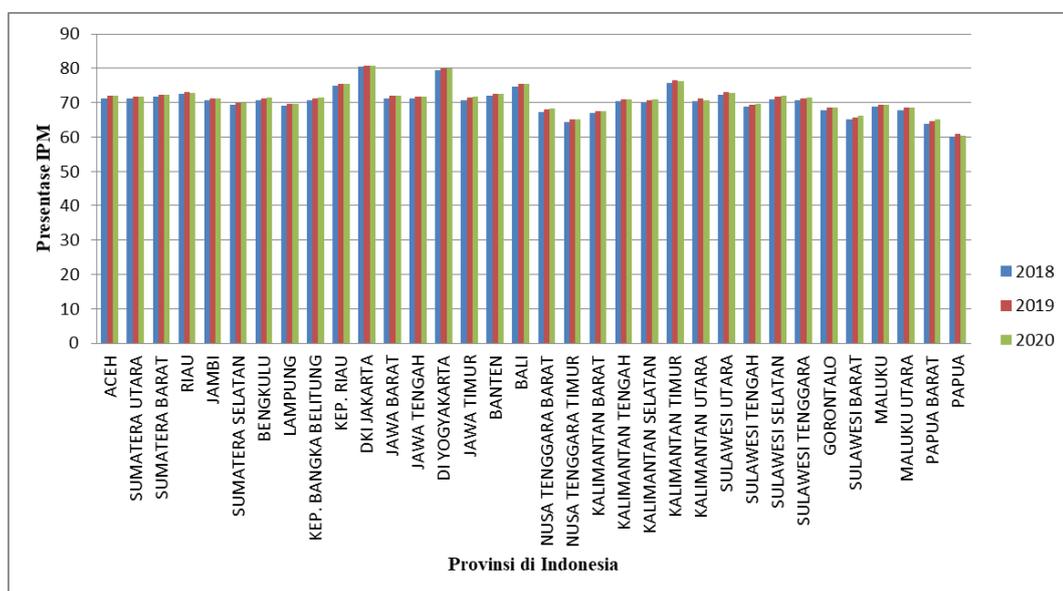
Gambar 1.1 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2018 – 2020. Dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran meningkat pada tahun 2020 di seluruh provinsi. Pada tahun 2018 dan 2019 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu Provinsi Banten, dengan persentase sebesar 8,47% dan menurun di 2019 menjadi 8,11%, sedangkan tahun selanjutnya 2020 tingkat pengangguran tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 10,95%, sedangkan provinsi dengan tingkat pengangguran terendah pada 2019 yaitu Provinsi Bali sebesar 1,57% dan pada 2020 terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,32%.

Persentase tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi. Namun terjadi peningkatan serentak pada tahun 2020. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka ini berdampak pada perekonomian Indonesia. Semakin menurun tingkat pengangguran akan semakin baik pula dampaknya pada perekonomian, begitu pula sebaliknya. Kinerja ekonomi makro merupakan keberhasilan atas variabel ekonomi makro baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan menurut jurnal C.A. Knox Lovell, Jesus, Pastor Judi Turner dengan judul *“Measuring macroeconomic performance in the OECD: A comparison of European and non-European countries”* kinerja ekonomi makro adalah seberapa baik kinerja suatu negara dalam mencapai tujuan penting atau target utama dari kebijakan pemerintah. Ada beberapa indikator dari ekonomi makro yang berpengaruh terhadap pengangguran. Dalam penelitian ini ada

beberapa variabel yaitu indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang tiap masing-masing variabel mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran.

Indikator ekonomi makro yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia dapat dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Pada dasarnya, dalam peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam mencapai pembangunan nasional, namun pada sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat maka jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan masalah pada bidang ketenagakerjaan. Peningkatan jumlah penduduk namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) maka mereka tidak akan mampu menempati lapangan pekerjaan yang ada diwilayah tersebut. SDM ini dapat diukur melalui besarnya indeks pembangunan manusia (IPM). Dwi M, Iin Nurhasanah (2019). Indeks pembangunan manusia dapat menurunkan tingkat pengangguran, salah satunya dilihat dari peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan, dengan meningkatnya infrastruktur pendidikan ini di suatu negara maka permasalahan tingkat pengangguran akan mudah diatasi, karena kualitas SDM atau angkatan kerja meningkat dan dapat masuk dalam kriteria tenaga kerja di pasar modern atau sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Namun pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh

pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2014” menunjukkan hasil positif antara variabel indeks pembangunan manusia dengan pengangguran, sedangkan menurut teori hubungan IPM dengan pengangguran adalah negatif. Adapun berikut data indeks pembangunan manusia pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2020:



Gambar 1.2 IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks pembangunan manusia memuat tiga kebutuhan yaitu hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak, semakin baik kesehatan tenaga kerja, tingkat pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja semakin bagus dan berkualitas, sebaliknya apabila keadaan tenaga kerja semakin buruk, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk dan tidak berkualitas. Ini menunjukkan bahwa tiga dimensi tersebut penting dalam pembangunan manusia yang menjadi

indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap bekerja sehingga akan mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu negara. (Sayifullah dan Gandasari 2016).

Gambar 1.2, merupakan data indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2018 – 2020, yang menampilkan perubahan data indeks pembangunan manusia pada tiga tahun terakhir. Pada 34 provinsi tidak mengalami kenaikan yang signifikan pada setiap tahunnya. Provinsi dengan jumlah IPM tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,47 pada 2018, meningkat pada tahun 2019 menjadi 80,76%, dan pada tahun 2020 menjadi 80,77%, sedangkan tingkat IPM terendah pada 2018 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pada 2019 IPM terendah Provinsi Papua sebesar 60,84% menurun ditahun 2020 menjadi 60,44%. Namun secara keseluruhan pertumbuhan IPM setiap provinsi cenderung meningkat. Hanya terdapat 10 provinsi yang menurun, sisanya semua meningkat.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia. Semakin menunjukkan angka yang rendah maka akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. Pada gambar 1.2 data IPM seluruh provinsi di Indonesia meningkat. Semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia pada suatu negara maka akan disertai dengan penurunan tingkat pengangguran dan sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan disertai dengan tingginya tingkat pengangguran di negara tersebut (Dwi Mahroji 2019).

Penyelesaian masalah pengangguran tidak hanya diharapkan melalui peningkatan IPM saja namun juga diharapkan melalui kinerja ekonomi lainnya seperti peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan perluasan kesempatan kerja melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang nantinya akan mengurangi jumlah pengangguran.

Indikator ekonomi makro selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia dapat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator yang sangat penting dalam melihat suatu perekonomian apakah meningkat atau tidak, yaitu dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Apabila terus meningkat dari tahun ke tahun selanjutnya, maka perekonomian mengalami peningkatan, sebaliknya apabila laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan maka perekonomian tidak baik, dan apabila laju pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kenaikan atau penurunan sama sekali berarti perekonomian tidak mengalami kemajuan.

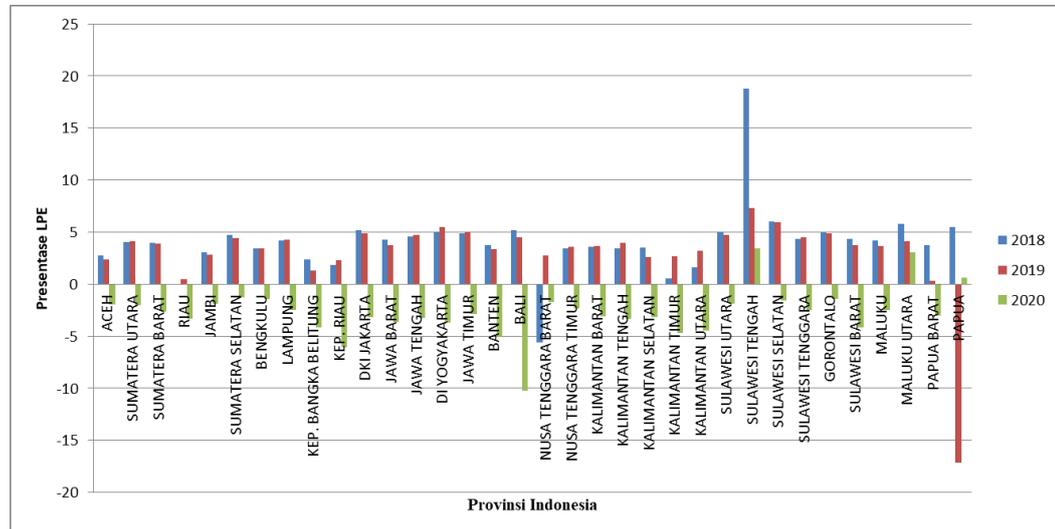
Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai bersih dari barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila PDRB meningkat maka jumlah nilai tambah barang dan jasa dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah meningkat. Barang dan jasa yang jumlahnya meningkat akan menyebabkan pula peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. PDRB atas harga konstan

digunakan untuk menunjukkan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ketahun. (Ainur R, Mamak M, Tri 2013).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kegiatan perekonomian yang menyebabkan pada peningkatan produksi barang maupun jasa yang dihasilkan masyarakat serta diikuti oleh peningkatan kemakmuran masyarakat yang dapat dilihat dari pendapatan domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara tersebut berkembang dengan baik. (Amri Amir 2007).

Menurut Sukirno (2016) salah satu faktor utama yang menimbulkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan dalam pengeluaran agregat, dimana perusahaan-perusahaan memproduksi barang maupun jasa dengan maksud mencari keuntungan dan keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para perusahaan menjual barang yang mereka produksikan, dengan demikian semakin besar akan permintaan terhadap barang tersebut, maka semakin banyak barang dan jasa yang akan diproduksi. Peningkatan hasil produksi yang dilakukan maka akan menambah pada penggunaan tenaga kerja dengan demikian terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, semakin tinggi pendapatan nasional maka akan semakin banyak penggunaan tenaga kerja dengan begitu tingkat pengangguran pun akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi meningkat maka pengangguran menurun. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ika Purnama (2015), dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Medan tahun 2000-2014” hasil dari

penelitian tersebut pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai pengaruh positif. Berikut data pertumbuhan ekonomi Indonesia:



Gambar 1.3 LPE Provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2020

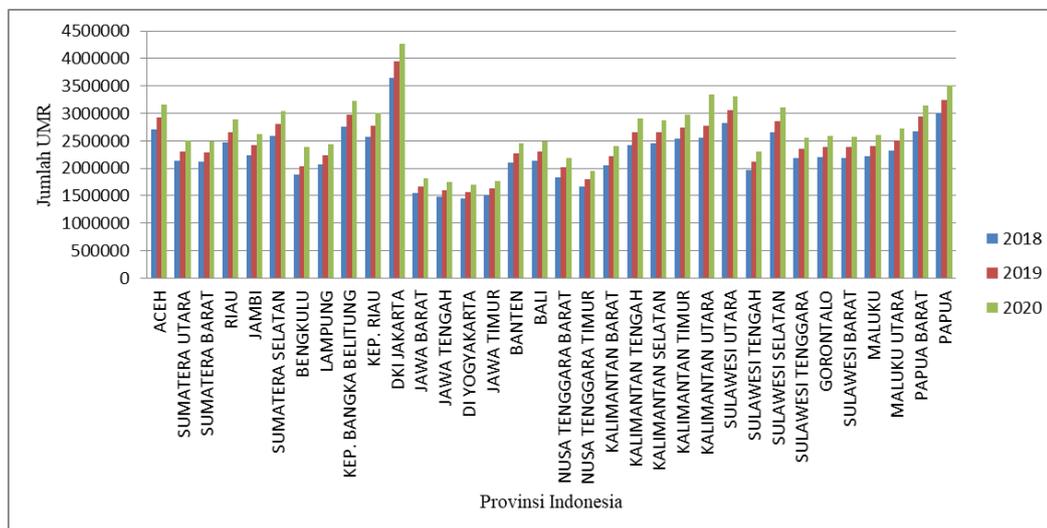
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data pada gambar 1.3 laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan, dimana dikhawatirkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi ini berdampak besar pada jumlah tingkat pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan angka negatif dikarenakan adanya pandemi yang banyak menghambat perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018 dan 2019 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 18,8% dan pada tahun 2019 sebesar 7,28%, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,41% dan masih jadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya, sedangkan provinsi paling rendah laju pertumbuhan ekonominya yaitu dari Provinsi Papua yang sudah menunjukkan angka negatif pada tahun 2019 sebesar -17,16%, berbeda dari provinsi lain, Provinsi Papua menunjukkan

kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,64%. Seluruh provinsi di Indonesia pada dua tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan.

Indikator ekonomi selanjutnya yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu Upah Minimum Regional (UMR). Permasalahan ekonomi yang utama selanjutnya dan paling mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia yaitu masalah upah yang rendah dan dampaknya secara langsung tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran, Mankiw (2000). Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya, Gilarso (2004). Upah merupakan balas karya tenaga kerja ini ada dua segi yang penting, yaitu untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan serendah mungkin. Untuk pekerja upah merupakan sumber penghasilan dan juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah, langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan status dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat dalam keseluruhan. Ainur R, Mamak M, Tri, (2013). Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti pula dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik maka akan berpengaruh pada tingkat pengangguran. Sukirno (2004). Namun pada hasil penelitian dari Jihad Lukis Panjawa, dan Daryono Soebagiyo (2014) yang menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran hasil analisis penelitian tersebut upah minimum mempunyai hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang berarti berbanding terbalik atau berlawanan dengan teori. Jumlah upah di

setiap provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk.



Gambar 1.4 UMR Provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2020

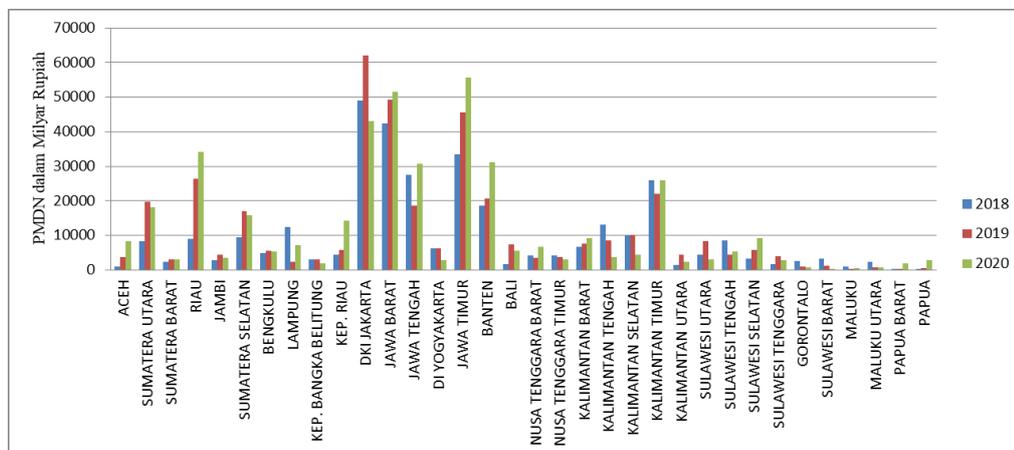
Sumber: Badan Pusat Statistik & insight data

Dapat dilihat pada gambar 1.4 dari tahun 2018-2020 upah minimum regional selalu meningkat disertai dengan pertumbuhan penduduk. Upah paling tinggi pada 2018 terdapat pada Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp3.648.035,00 2019 menjadi Rp3.940.973,00 meningkat pada tahun selanjutnya menjadi Rp4.267.349,00. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang telah bekerja. Semakin tinggi upah yang ditawarkan maka semakin tinggi biaya produksi, sementara untuk melakukan efisiensi perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja yang akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran.

Indikator selanjutnya adalah penanaman modal yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal atau investasi merupakan awal dari pembangunan ekonomi. Sumber investasi di suatu negara yaitu dari penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing. Kedua penanaman modal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu meningkatkan perekonomian sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi masalah pengangguran. Keberhasilan penanaman modal dalam suatu negeri, terutama pada masa krisis ekonomi, yang dilakukan oleh para ekonom tentunya memberi pengaruh positif bagi kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini tergantung dari sejauh mana kendala ekonomi yang menghambat pulihnya penanaman modal dapat diatasi dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk menciptakan perubahan sumber daya menjadi kekuatan ekonomi riil, maka kegiatan penanaman modal sebagai salah satu upaya dalam memaksimalkan bangkitnya perekonomian dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk aset yang dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta, yang mempunyai peranan penting. Menurut UUD Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik itu yang dimiliki oleh negara maupun swasta yang berdomisili di Indonesia, disediakan guna menjalankan suatu usaha selama modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang mengatur mengenai modal asing. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dapat secara perorangan ataupun merupakan badan hukum yang dibangun berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. PMDN merupakan penggunaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan undang-undang penanaman modal. Adanya PMDN maka banyak terciptanya lapangan

pekerjaan yang akan mengurangi tingkat pengangguran. Berikut data PMDN dan PMA tahun 2018 sampai 2020 di 34 provinsi di Indonesia:



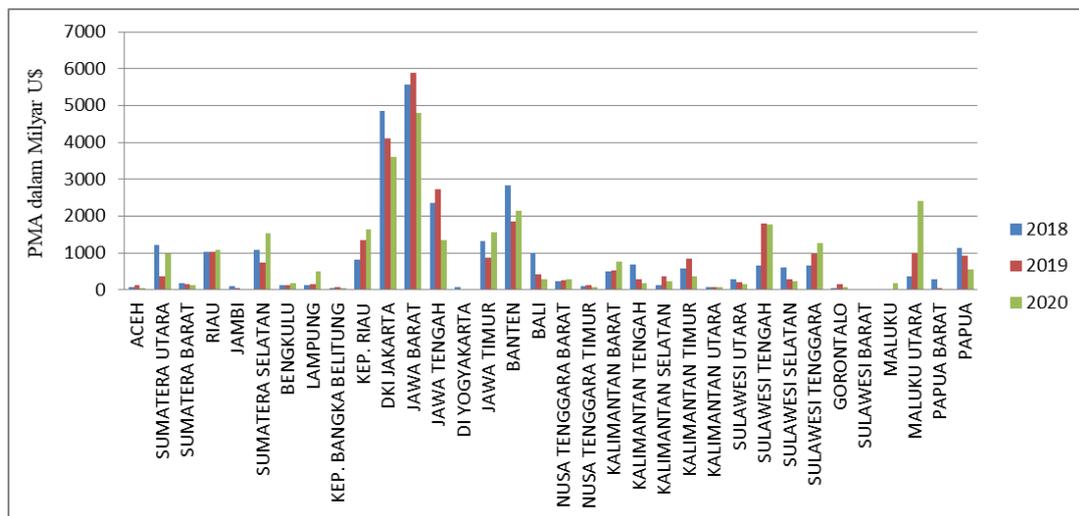
Gambar 1.5 Data Penanaman Modal Dalam Negeri provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat gambar 1.5, data penanaman modal dalam negeri di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 PMDN paling tinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 49 097,4 Milyar dan 62 094,8 Milyar namun menurun pada tahun selanjutnya menjadi 42 954,7 Milyar, sedangkan pada tahun 2020 provinsi dengan PMDN terbesar adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 55 660,6 Milyar. PMDN mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang telah bekerja. Semakin tinggi penanaman modal dalam negeri maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka.

Indikator terakhir adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat namun tidak disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Sektor yang diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor industri, namun nyatanya beberapa sektor industri tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan yang

apabila mengalami krisis akan menutup usahanya karena biaya produksi yang tinggi, atau bahkan beberapa perusahaan bertahan dengan mengurangi jumlah karyawan. Adapun perusahaan yang mengubah penggunaan modal seperti perusahaan padat karya namun berganti menjadi perusahaan padat modal agar lebih efisiensi dalam biaya produksinya.



Gambar 1.6 Data PMA Provinsi di Indonesia Tahun 2019 – 2020 (USDollar)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Penanaman modal asing ini merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik itu dengan modal asing sepenuhnya maupun bersama-sama menanam dengan pemodal dari dalam negeri. Banyak sekali perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerja karena tingginya biaya produksi, menyebabkan banyak tenaga kerja yang menganggur akibat pemutusan hubungan kerja. Untuk menghindari peningkatan tingkat pengangguran ini peran pemerintah sangat penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengatasi pengangguran. Investasi menjadi salah satu awal dari pembangunan ekonomi. Investasi sangat penting

dalam perekonomian di suatu negara, apalagi untuk negara berkembang seperti Indonesia, terutama investasi asing. Dimana dari investasi ini dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Penanaman modal asing ini juga dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, dengan begitu banyak tenaga kerja yang terserap dan mengurangi tingkat pengangguran.

Dari gambar 1.6 data penanaman modal asing di Indonesia mengalami fluktuasi. Ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan ada pula yang mengalami penurunan. PMA paling tinggi pada tahun 2018 dan 2019 terdapat pada Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar \$5 573,5 dan \$5 881,0 Juta US, sedangkan provinsi paling rendah pada 2019 yaitu Provinsi DIY sebesar \$14,60. Provinsi terendah pada 2020 yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar \$6,50 Juta dollar.

Dari uraian latar belakang tersebut sehingga judul penelitian yang diambil penulis adalah: **“Analisis Kinerja Ekonomi Makro terhadap Pengangguran di Indonesia pada Tahun 2011 – 2020 (Studi kasus di 34 provinsi seluruh Indonesia)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing secara parsial terhadap pengangguran di Indonesia 2011 – 2020?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing secara bersama-sama terhadap pengangguran di Indonesia 2011 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pengangguran di Indonesia 2011 – 2020
2. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama terhadap terhadap indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pengangguran di Indonesia 2011 – 2020

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah diperoleh diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak. Adapun kegunaan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu serta pengetahuan tentang bagaimana pengaruh variabel ekonomi makro terhadap pengangguran di Indonesia
2. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sedikit pengetahuan, memberikan informasi dan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengangguran.

